



Melampaui Sekularisasi : Meninjau Ulang Peran Agama di Ruang Publik pada Era Disrupsi

Dwi Wahyuni^{1*}

¹ Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia; dwiwahyuni@uinib.ac.id

* Correspondence

Received: 2021-05-29; Accepted: 2021-07-30; Published: 2021-07-30

Abstrak: Apakah Teori sekularisasi telah mati?, sepertinya tidak. Ide sekularisasi terus berkembang dan menunjukkan bahwa sekularisasi tidak akan pernah terjadi secara total dan tidak terkubur menjadi teori yang gagal. Tetapi karena dunia saat ini sudah berada pada realitas yang jauh berbeda dari era teori sekularisasi muncul, maka sekularisasi mesti dilampaui. Saat ini dunia telah masuk pada era disrupsi yang ditandai kemajuan teknologi sebagai hasil Revolusi Industri 4.0. Pada era disrupsi terjadi perubahan signifikan dalam kehidupan beragama. Artikel ini bertujuan untuk melengkapi kajian kepustakaan terkait bagaimana semestinya agama berperan dalam ruang publik pada era disrupsi. Sehingga agama dapat dirasakan manfaatnya dalam kehidupan nyata. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi pustaka. Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan analisis data dengan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa agama tidak harus disudutkan dari ruang publik, sejauh ruang publik dapat menjadi ruang bersama untuk mengekspresikan ragam agama yang ada dan agama tidak sekedar dipahami sebatas simbolis namun lebih mendalam pada pemahaman otentisitas beragama. Satu hal yang penting untuk dihindari ialah dominasi satu agama atau satu paham keagamaan dalam suatu agama, sebab dengan dinamika dan dialektika ragam identitas agama yang ada dapat menjadi kekayaan kultural dalam membangun kehidupan publik yang lebih baik. Kegagalan menetralkan dominasi satu agama atau paham keagamaan dalam suatu agama di ruang publik akan membawa dunia kembali pada masa lalu yang kelam, penuh dengan peperangan dan kekerasan.

Kata Kunci: revolusi industri; otentisitas agama; sosiologi agama; masyarakat pasca kebenaran

Abstract: Is the theory of secularization dead? It seems not. The idea of secularization continues to develop and shows that secularization will never occur totally, but it will not be buried into a failed theory. However, since the world today is already in a reality far different from the era of the emerging secularization theory, secularization must be transcended. Nowadays, the world has entered a period of disruption marked by technological progress due to the Industrial Revolution 4.0. In this era, there have been significant changes in religious life. This article aims to complement the literature review regarding how religion should play a role in the public sphere in the era of disruption so that the benefits of religion can be felt in real life. Data collection was carried out using literature study techniques. Data analysis was carried out using the Miles and Huberman model. The results of this study indicate that religion does not have to be isolated from the public sphere, so far as the public sphere can be a common space to express the various religions that exist and religion is not only understood as symbolic, but is deeper in understanding the authenticity of religion. One important thing to avoid is the domination of one faith or one religious understanding within religion. The dynamics and dialectics of the various religious identities that exist can become cultural assets to build a better public life. Failure to neutralize the domination of one religion or religious understanding in religion in the public sphere will bring the world back to a dark past, full of wars and violence.

Keywords: industrial Revolution; religious authenticity; sociology of religion; post-truth society

1. Pendahuluan

Teori sekularisasi biasanya merujuk pada sejumlah karya tahun 1950an dan 1960an. Teori sekularisasi sederhananya menyatakan modernisasi sesungguhnya menyebabkan merosotnya agama, baik dalam ranah masyarakat maupun ranah individu (Latif, 2013; Pachoer, 2016). Pendukung teori sekularisasi mendapat kritik tajam dari Rodney Stark. Menurut Stark, ditinggalkannya agama oleh penganutnya bukan disebabkan oleh modernisasi dan rasionalisasi melainkan disebabkan monopoli keagamaan yang dilakukan oleh institusi keagamaan.

Rodney Stark dan Laurence R. Lannaccone menyajikan suatu teori *Rational Choice Theory of Religion* atau *Supply-Side Theory of Religion* (Rodney Stark & Iannaccone, 1994). Dikatakan bahwa individu membutuhkan keteraturan, kebermaknaan dan tujuan ultimate yang dengan baik telah diberikan oleh agama. Individu yang memilih secara rasional pada suatu pasar kompetitif akan memilih supplier yang dapat memenuhi kebutuhannya. Sementara dalam suatu situasi monopoli, individu yang kebutuhannya ditekan atau sedikit terpenuhi, maka permintaannya akan menjadi lumpuh. Berdasarkan dengan tingginya tingkat keyakinan keagamaan dan kehadiran ke gereja di Amerika Serikat, Stark dan Laurence menegaskan bahwa alasan mundurnya tingkat kehadiran ke gereja di Eropa dikarenakan monopoli keagamaan yang dilakukan oleh gereja-gereja diberbagai negara Eropa. Sebaliknya, keagamaan di Amerika Serikat sangat kompetitif dan cair. Sehingga konsekuensinya menjadikan organisasi-organisasi keagamaan lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan kebutuhan individu-individu dalam masyarakat. Karena itu, agama mengalami peningkatan di Amerika Serikat.

Peter Berger yang awalnya mendukung sekularisasi dan pada akhirnya berbalik menyatakan bahwa sekularisasi telah salah. Menurut Berger, "Saya pikir apa yang saya dan kebanyakan sosiolog agama lainnya tulis di tahun 1960an tentang sekularisasi adalah sebuah kesalahan. Argumen utama kami adalah bahwa sekularisasi dan modernitas berjalan beriringan. Dengan semakin modern semakin banyak sekularisasi. Itu bukan teori gila. Ada beberapa bukti untuk itu. Tapi saya pikir itu pada dasarnya salah. Sebagian besar dunia saat ini tentu tidak sekuler. Ini sangat religius" (Berger, 1997). Stark menyimpulkan dalam tulisannya "setelah hampir tiga abad mengalami penyimpangan yang benar-benar gagal baik saat ini maupun masa lalu, tampaknya saatnya untuk membawa doktrin sekularisasi ke kuburan teori yang gagal, dan di sana untuk membisikkan *requiescat in pace*" (R. Stark, 1999).

Apakah teori sekularisasi telah mati?, sepertinya tidak. Diskursus teori sekularisasi terus berkembang. Menggunakan tipologi sekularisasi Donald E. Smith, Yudi Latif menganalisis sekularisasi di Indonesia. Menurut Smith, sekularisasi memiliki empat karakteristik yaitu: *pertama*, pemisahan jagad politik dari ideologi dan struktur organisasi keagamaan. *Kedua*, perluasan otoritas politik untuk menjalankan fungsi pengaturan dalam wilayah sosial ekonomi yang sebelumnya berada dalam yurisdiksi agama. *Ketiga*, Demistifikasi budaya politik untuk menekankan tujuan-tujuan temporal nontransendental, serta cara-cara yang rasional dan pragmatis yaitu nilai-nilai politik sekular. *Keempat*, Dominasi politik atas kenayakinan, praktik serta organisasi keagamaan yang mengakibatkan terlibatnya ekspansi politik yang bertujuan untuk menghancurkan dan mengubah agama dengan cara radikal (Latif, 2013).

Penelitian Yudi Latif menunjukkan tipe sekularisasi pertama telah terjadi dan berlangsung secara luas di Indonesia. Sistem politik yang secara formal tidak memperoleh legitimasi dari agama. Hal ini terlihat dari realitas bahwa Indonesia bukanlah negara agama. Tipe kedua telah berlangsung lebih jauh lagi. Otoritas agama dibidang utama kehidupan seperti bidang pendidikan, hukum, dan ekonomi, secara garis besar telah diambil alih oleh otoritas sekuler. Dua tipe sekularisasi ini dapat dijalankan secara cepat di Indonesia karena prosesnya dapat dipaksakan oleh elite politik melalui upaya modernisasi dan kebijakannya bisa diambil tanpa harus melibatkan persetujuan massa. Proses tipe sekularisasi ketiga, tipe sekularisasi budaya politik masih sulit untuk diwujudkan di Indonesia. Hal ini

tercermin dari masih bertahannya partai agama, peran tokoh agama sebagai *broker* politik, dan masih banyaknya peraturan syariah dalam politik lokal. Ini terjadi karena para elit penguasa tidak bisa mengarahkan secara sepihak. Masih kuatnya kesadaran agama dan ketahanan budaya keagamaan masyarakat Indonesia menjadi alasan mengapa proses tipe sekularisasi keempat juga tidak terjadi di Indonesia (Latif, 2013).

Artikel ini berdasarkan pada asumsi bahwa sekularisasi tidak akan pernah terjadi secara total dan tidak terkubur menjadi teori yang gagal. Tetapi karena dunia saat ini sudah berada pada realitas yang jauh berbeda dari era teori sekularisasi muncul, maka sekularisasi mesti dilampaui. Saat ini dunia telah masuk pada era disrupsi yang ditandai kemajuan teknologi sebagai hasil Revolusi Industri 4.0. Pada era disrupsi terjadi perubahan signifikan dalam kehidupan beragama. Banyak ahli menyebutkan agama yang dibutuhkan pada era disrupsi ialah agama yang bukan hanya mendasarkan pada agumentasi bersifat ideal yang terdapat dalam dalil Kitab Suci, melainkan mesti mendasarkan pada fakta-fakta empiris yang faktual (Mukhlisin, 2020).

Artikel ini bertujuan untuk melengkapi kajian kepustakaan terkait peran agama di ruang publik. Ruang publik pada era disrupsi penuh dengan 'polusi' prasangka dan kebencian. Secara sederhananya disrupsi merupakan sesuatu yang tercabut dari akarnya. Rhenald Kasali (2020) mendefinisikan disrupsi ialah suatu inovasi yang menggantikan sistem lama dengan cara-cara yang baru, menggantikan teknologi lama dengan teknologi digital. Era disrupsi merupakan era ketika bergesernya aktivitas personal dan sosial masyarakat dari dunia nyata ke dunia maya. Umumnya pembahasan mengenai disrupsi terkait dengan berubahnya berbagai hal teknis kehidupan manusia secara fundamental oleh kemajuan teknologi. Namun disrupsi tidak hanya mempengaruhi hal-hal teknis yang menunjang kehidupan manusia, tetapi juga mempengaruhi kehidupan beragama yang dapat mengubah cara pandang beragama serta praktik-pratik keberagamaan (Zaenuddin, 2020).

Era disrupsi melahirkan *post-truth society* (masyarakat pasca kebenaran). *Post-truth* bearti setelah kebenaran atau sudah tidak pentingnya kebenaran, yang penting adalah pengulangan-ulangan propaganda sehingga akan dipercaya sebagai kebenaran. Evan Davis (2017) menyampaikan hal sangat pahit berkaitan dengan *Post-truth*, yaitu budaya yang sangat maju dengan teknologi canggih ternyata sampai pada puncak *bullshit*. *Bullshit* dijelaskan Evan Davis sebagai salah satu fitur kunci dari budaya saat ini dan merasuk dalam segala unsur kehidupan, baik politik maupun sehari-hari. *Bullshit* adalah isi dan esensi dari *Post-truth*. Keterangannya hampir sama dengan *Post-truth* yaitu dimana emosi lebih dianggap penting daripada fakta dan bukti. Tanda *Post-truth* adalah hoax dan berita palsu. Berita palsu bisa berupa berita yang sengaja dibuat untuk menipu atau mengakali. sedangkan hoax biasanya dibuat dalam bentuk poster atau kalimat pendek yang provokatif untuk melahirkan ketakutan sehingga akhirnya orang beralih menjadi bergabung kepada pilihan yang dianjurkan dalam hoax tersebut (Alimi, 2018).

Pada era disrupsi dibutuhkan agama yang ramah dan penuh cinta dengan sesama manusia dan lingkungan demi kehidupan bersama yang damai. Namun, tujuan mulia agama untuk perdamaian masih mengawan di atas langit sebagai suatu yang tidak terbumikan. Wajah agama yang ramah terkalahkan dengan wajah kejam penganutnya. Penghujung abad ke-20, sentimen agama muncul sebagai sumber yang memicu konflik di beberapa negara, termasuk Indonesia. Sentimen agama mampu memobilisasi massa dan masuk dalam arus konflik yang eskalatif (Affandi, 2004). Agama yang mengajarkan perdamaian, tiba-tiba tampil sebagai senjata untuk melegitimasi tindakan kekerasan pemeluknya. Tidak terhindarkan sisi agama yang disintegratif tampil di ruang publik. Fokus pembahasan artikel ini ialah bagaimana semestinya agama berperan dalam ruang publik pada era disrupsi. Dengan fokus pembahasan ini, diharapkan dapat menampilkan data kepustakaan yang dapat membuka pemahaman bersama akan agama yang ramah dan penuh cinta dengan sesama manusia dan lingkungan. Sehingga agama dapat dirasakan manfaatnya dalam kehidupan nyata.

2. Metode Penelitian

Artikel ini merupakan hasil penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan sistematis mulai dari mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data sampai memberikan kesimpulan dari data yang ada. Data dalam penelitian ini bersumber dari berbagai macam bahan pustaka seperti buku, artikel jurnal, catatan, dokumen, dan bahan pustaka lainnya yang relevan dengan pembahasan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penyelusuran literatur yang terkait dengan pembahasan tentang sekularisasi, agama dan media baru atau dunia digital, agama di era disrupsi. Beberapa sumber utama dalam artikel ini adalah *Mediatisasi Agama, Post-Truth dan Ketahanan Nasional: Sosiologi Agama Era Digital* (Alimi, 2018); *The Death of Expertise: The Campaign Against Established Knowledge and Why it Matters* (Nichols, 2017); *The Fourth Industrial Revolution* (Schwab, 2016); *Tuhan Pun Tidak Partisan: Melampaui Sekularisme dan Fundamentalisme* (Latif, 2013); *Secularization, R.I.P.* (R. Stark, 1999). Setelah data terkumpul dilakukan analisis data secara interaktif dan terus menerus sampai dirasa cukup. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman. Dimana analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan (Sari & Asmendri, 2020).

3. Hasil Penelitian

3.1. Relasi Agama dan Negara

Model pemerintahan teokratis tidak pernah berjalan mulus sejak lama. Di puncak kekuasaan Israel dibawah raja Daud dan Sulaiman, mekanisme negara dan para pemimpinnya jauh dari ideal. Ramalan Kitabiah selama 400 tahun berikutnya melukiskan gerak jatuh-bangun yang berpuncak pada penghancuran Yerusalem oleh bangsa Babilonia pada 587 SM. Para nabi dari Nathan hingga Yeremia adalah figur-figur utama dalam agama ini selama 3 abad itu. Mereka mengunggulkan pemahaman mereka tentang kebenaran hingga kekuasaan, seruan kepada para pemimpin politik dan agama saat itu agar menjauhkan kebijakan-kebijakan eksploitasi yang represif, demi kepentingan diri sendiri. Kesaksian profetis terpusat bukan pada dogma, tetapi pada prinsip keadilan, kejujuran, kerendahan hati, dan rasa iba (Kimball, 2008).

Orang-orang Kristen awal tidak mengendalikan struktur pemerintahan. Sebaliknya, mereka sering menerima perlakuan berutal dari pemerintah. Segalanya berubah pada abad ke-4 ketika raja Konstantin menjadikan Kristen sebagai agama resmi kekaisaran Romawi. Banyak eksperimen membentuk struktur pemerintahan Kristen memenuhi lembaran sejarah Gereja. Meskipun banyak orang Kristen yang menengok kembali kaum Calvin di Jenawa atau kaum Puritan di New England untuk memperoleh petunjuk, saat ini masih tidak ada antusiasme terhadap negara yang terkait dengan Gereja. Sebaliknya, sisa-sisa model tersebut di beberapa bagian Eropa nyata-nyata memasukan Gereja Resmi yang hampir punah (Kimball, 2008).

Kaum muslim sering menunjuk masa 10 tahun kekuasaan Muhammad di Madinah (622-632 M) dan masa Khulafa' Rasyidun (632-661 M) sebagai zaman keemasan yang memberikan model untuk diikuti. Sistem ini berjalan dengan baik bagi ruang dan waktunya. Namun demikian, ada banyak masalah serius, termasuk perlakuan terhadap orang Yahudi di Madinah dan dorongan kampanye militer kaum Muslim menjelaskan masa-masa tersebut dalam konteksnya. Akan tetapi, konteks sekarang ini jauh berbeda (Kimball, 2008).

Persoalan hubungan agama dan negara telah dinyatakan tuntas ketika perang dingin berakhir dan berakhir pula evolusi ideologis umat Islam dalam bentuk paham demokrasi yang liberal-sekular. Negara Sekular dinyatakan sebagai pemenang yang mengusung demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Tampilannya negara sekular sebagai pemenang mencerminkan sejarah kelam hubungan agama dan negara di Eropa. Bentangan panjang sejarah kelam Eropa yang identik dengan penindasan negara atas nama agama diselesaikan dengan memisahkan agama dan negara. Agama dibatasi

peranannya pada ranah privat serta dijauhkan dari ruang publik. Sejalan dengan itu teori modernisasi meniscayakan sekularisasi sebagai bagian yang melekat dari modernitas (Latif, 2016).

Namun, karena ledakan konflik etnis dan agama, politik di Eropa Timur ditata ulang. Di beberapa negara Barat, Bosnia, Ruanda, Burma, India, Asia Tengah dan juga di Indonesia, isu-isu etnis dan agama menyatakan dirinya kembali dengan gelombang yang belum pernah terjadi sejak perang dunia ke II. Bahkan di Amerika Serikat sebagai jantung demokrasi liberal, para fundamentalis agama terus masuk ke tengah ruang publik dan memperoleh memontumnya saat George W. Bush menjadi presiden Amerika Serikat. Pertumbuhan agama diberbagai bagian dunia (kecuali beberapa negara di Eropa Barat) mengalami gelombang peningkatan. Hal ini membuat Jose Casanova (2009) menyimpulkan bahwa diferensiasi modern bukanya menghambat tapi justru memicu pertumbuhan agama. Teori sekularisasi yang mengurangi peran agama mengalami kegagalan (Latif, 2016). Akibat kekurangan bukti empiris, bagi Jose Casanova teori sekularisasi mengalami kegagalannya. Kebangkitan gerakan keagamaan, pembebasan teologi Katolik serta kebangkitan politik Islam menunjukkan bahwa terjadinya deprivatisasi agama (Latif, 2013).

Di Indonesia, penelitian Yudi Latif menunjukkan bahwa sekularisasi selalu “dipaksakan” dari atas. Maksudnya, sekularisasi di Indonesia dipandang bermula dari pusat kuasa (*power center*) menuju pinggir kuasa dalam suatu masyarakat. Sedangkan kebangkitan agama di Indonesia dipandang bermula dari pinggir menuju pusat kuasa. Dialektika sekularisasi dan kebangkitan agama terus menjadi gambaran utama dalam politik Indonesia. Menurut Yudi Latif, setidaknya dalam waktu dekat ini, tidak akan terjadi sekularisasi secara total maupun kebangkitan agama secara total. Karena masing-masing dari keduanya memiliki senjata dan arenanya sendiri untuk bisa bertahan (Latif, 2013).

Dalam sejarah Indonesia, sekularisasi sudah sejak lama bahkan sebelum Indonesia merdeka telah menjadi bagian dari proses pembangunan bangsa Indonesia. Mulanya sekularisasi yang dilancarkan oleh kolonial Belanda bertujuan untuk melemahkan gerakan umat Islam yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Islam yang dijadikan faktor pemersatu masyarakat Indonesia ketika itu untuk mengakhiri penjajahan dan meraih kemerdekaan Indonesia. Namun, semua perjuangan umat Islam secara sepihak di redam oleh kolonial Belanda dengan membuat banyak kebijakan yang bersifat kultural dalam masyarakat melalui elit politik Bumi Putera dan elit keagamaan serta dengan cara tindakan represif melalui peperangan. Kolonial Belanda melarang keras ekspresi keagamaan, khususnya Islam. Islam yang dianggap sebagian besar masyarakat Indonesia bukanlah sebagai agama semata, melainkan sebuah ideologi gerakan. Karena itu, Belanda dengan seorang orientalis Snouck Hurgronje hanya memberi ruang pengembangan agama Islam pada bidang ritual keagamaan, namun melarang Islam berperan dalam bidang politik (Latif, 2013).

Meskipun terkesan lebih akomodatif terhadap Islam, kolonial Jepang juga meniru sikap kolonial sebelumnya terkait dengan politik Islam di Indonesia. Dengan cara yang sama dilakukan oleh kolonial Belanda yang secara tegas memisahkan antara Islam dengan politik, Jepang juga menyatakan mereka tidak memberikan toleransi terhadap Islam dan Politik (Latif, 2013). Hal ini dapat terlihat pada 29 April 1945 saat penyusunan anggota BPUPKI. Dalam keanggotaan BPUPKI tersebut hanya terdapat sepuluh wakil golongan Islam dari 62 anggota yang ada. Sepuluh anggota tersebut ialah Wahid Hasyim, Agus Salim, Mas Mansur, Sukiman Wirjosandjojo, Abikusno Tjokrosuoso, Abdul Halim, Ki Bagus Hadikusumo, Ahmad Sanusi, Masjkur, dan Abdul Kahar Muzakir (Yamin, 1959). Dominannya orang-orang sekuler dalam BPUPKI mencerminkan bahwa Jepang lebih ingin memberikan kedaulatan Indonesia kepada orang-orang yang dianggap sanggup memerintah Indonesia secara modern.

Setelah Indonesia merdeka, para pendiri negara Indonesia terpecah. Ada yang ingin negara Indonesia menjadi negara yang sekular dan ada yang menginginkan negara Indonesia menjadi negara yang berasaskan Islam. Akhirnya sebagai jalan tengah dan dengan kesepakatan bersama para pendiri

bangsa ketika itu terbentuklah Pancasila. Pancasila sering dianggap sebagai bentuk sekularisasi di Indonesia. Puncaknya pada tahun 1985, Pancasila menjadi asas tunggal di Indonesia dalam pelaksanaan kehidupan bernegara dan berbangsa. Hal ini berdampak pada pelarangan menggunakan simbol-simbol agama dalam politik. Pemerintah saat itu merealisasikan sekularisasi di Indonesia secara represif, dilakukan dengan cara yang sistematis dan terstruktur, juga mendapatkan sedikit dukungan dari pemikir Muslim. Walau terjadi sekularisasi yang sistematis dan terstruktur, namun dalam masyarakat Indonesia tidak terjadi sekularisasi yang berarti. Karena umat beragama khususnya umat Islam masih kuat menjalankan orientasi dan praktik keagamaan dalam kehidupan personal dan sosialnya serta umat Islam tetap mensosialisasikan ajaran agama Islam secara kultural. Sehingga sekularisasi atas-bawah yang dilakukan pemerintah mengalami kegagalan (Latief, 2017).

Di era Reformasi pada tahun 1998, menjadi momentum kebebasan dan demokrasi dimanfaatkan oleh para tokoh-tokoh Islam kembali memperjuangkan politik Islam dengan cara mendirikan berbagai macam organisasi di masyarakat yang berdasarkan ajaran Islam dan partai politik yang berdasarkan Islam. Akan tetapi belajar dari sejarah partai Islam di masa lalu dalam memperjuangkan Islam menjadi dasar negara, seperti yang terjadi saat persiapan kemerdekaan tahun 1945 dan Konstituante Republik Indonesia tahun 1956-1959. Tokoh-tokoh Islam era Reformasi tidak mengulangi perjuangan serupa (Latif, 2013). Walaupun di awal Reformasi sempat muncul gagasan dan perdebatan saat amandemen UUD 1945 untuk memasukkan semangat Piagam Jakarta atau pelaksanaan syari'at Islam di konsitusi Indonesia. Namun gagasan itu tidak dapat diterima dalam sidang MPR.

Sebagian besar kelompok Islam Indonesia mendukung demokratisasi dan modernisasi politik, hanya ada sebagian kecil saja yang menolak. Secara historis peta politik Indonesia yang ditampilkan mengarahkan Indonesia sebagai negara sekular yang moderat, dimana dalam konsitusi negara Indonesia agama tidak dijadikan landasan dasar negara, akan tetapi nilai-nilai agama tetap masih di pertahankan dan dijadikan landasan etik dalam kehidupan bermasyarakat (Suhandi, 2012). Meskipun dalam konsep sistem ketetaneagaan maupun realitasnya, sekularisasi di Indonesia tidak benar-benar sepenuhnya terjadi. Hubungan agama dan negara tetap terjalin dalam bentuk *intersectional* yakni hubungan saling bersinggungan antara agama dan negara. Tidak sepenuhnya terpisah dan tidak sepenuhnya terintegrasikan. Di dalam hubungan *intersectional* adanya aspek-aspek keagamaan yang masuk ke kenegaraan atau sebaliknya. Karena itu, seringkali dikatakan bahwa Indonesia bukan merupakan negara sekuler dan juga bukan negara agama. Indonesia adalah negara yang secara kelembagaan berbentuk sekuler dan secara filosofis mengakui keeksistensian agama dalam kehidupan berbangsa (Latif, 2013).

3.2. Agama di Era Disrupsi

Sekarang ini lebih dikenal dalam dunia industri dengan sebutan Revolusi Industri 4.0 dengan artian yakni bidang industri sudah mulai menggunakan serta memanfaatkan sistem digital dalam segala hal seperti dalam sistem produksi, pemasaran sekaligus juga dalam sistem transaksi. Perkembangan Industri 4.0 merupakan transformasi dari praktik industri yang sudah berjalan sebelumnya. Level pertama atau 1.0 disebut dengan industri 1.0 dimana mesin-mesin mekanik tradisional masih banyak digunakan. Pada industri 1.0 sistem manual masih dominan digunakan, walau tenaga mesin sudah digunakan untuk diperuntukan alat-alat tertentu, yang paling sering di gunakan yakni tenaga industri yang dibantu kekuatan air. Selanjutnya pada industri level kedua atau disebut dengan industri 2.0, dimana di dunia perindustrian sudah mulai bergerak maju terlihat dari para pelaku usaha sudah mulai menggunakan atau memanfaatkan tenaga listrik dalam proses produksi.

Sedangkan pada level ketiga atau di industri 3.0 yang merupakan era komputerisasi. Pada industri 3.0 dengan memanfaatkan sistem komputerisasi. Para pelaku usaha bisa lebih cepat dan praktis dalam proses produksi dan distribusi yang ada. Pada industri 3.0 juga sudah mulai memanfaatkan jaringan internet meskipun jangkanya masih terbatas. Sedangkan pada level keempat yakni industri 4.0,

berbeda dengan industri 3.0, dimana semua sistem sudah serba digital dan sudah sangat lancar. Pada industri 4.0 basis koneksi internet menjadi faktor yang mendasar yang telah menggunakan *cyber system*, dimana sistem menghubungkan manusia satu dengan lainnya secara terbuka. Pemasaran dan transaksi produk dalam dunia industri bisa berjalan tanpa harus berinteraksi secara langsung (*face to face*).

Hadirnya Revolusi Industri 4.0 dengan basis koneksi internet membuat kehidupan keseharian manusia menjadi lebih cepat, praktis, dan lebih mudah dengan bantuan berbagai macam teknologi digital (Schwab, 2016). *smartphone* merupakan salah satu sarana untuk dapat memanfaatkan koneksi internet. Manusia saat ini tidak bisa lagi menghindar dari *smartphone*. *Smartphone* mempengaruhi bagaimana manusia saat ini mempraktikkan agama. Saat ini banyak orang membaca kitab suci melalui *smartphone*. Praktik ini mempengaruhi bagaimana memperlakukan dan menafsirkan kitab suci. Menurut Philip (2018), bagaimana kitab suci dibaca mempengaruhi kitab suci ditafsirkan. Kitab suci yang dibaca melalui monitor lebih banyak diartikan secara harfiah daripada pembacaan melalui cetak. Interpretasi harfiah bias berakibat fundamentalisme (Alimi, 2018).

Harapannya internet menjadi suatu 'public sphere' ala Habermas (1991), yaitu suatu area dalam kehidupan sosial dimana individu dapat dengan bebas mengidentifikasi masalah-masalah kemasyarakatan dan mendiskusikannya. Melalui diskusi tersebut diharapkan dapat mempengaruhi tindakan politik. Atau seperti Gerard A. Hauser yang mendefinisikan internet sebagai ruang diskursif dimana individu dan kelompok berinteraksi guna mendiskusikan hal-hal yang merupakan kepentingan bersama dan jika memungkinkan untuk mencapai suatu kesepakatan bersama yang bermanfaat (Alimi, 2018).

Kecanggihannya teknologi bisa dirasakan dan digunakan oleh siapa saja. Melalui ujung jari sudah bisa berselancar di dunia digital untuk menemukan berbagai macam informasi yang dibutuhkan. Saat ini agama lebih banyak dibentuk oleh logika media baru. Para sarjana agama menyebut fenomena ini sebagai mediatisasi agama, yaitu fenomena kebudayaan dimana ekspresi keagamaan dilakukan melalui internet dan media online. Media massa maupun media jejaring sosial telah menjadi sumber informasi dan pengalaman penting tentang agama (Hjarvard, 2016). Media sosial menjadi sumber informasi yang dominan dan utama bagi masyarakat saat ini. Bahkan media sosial juga menjadi sumber utama untuk informasi dan pengetahuan keagamaan. Masyarakat modern menggantungkan sumber informasi dari media sosial yang mereka miliki. Padahal tidak semua informasi yang didapatkan benar adanya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi ajang penyebaran berita palsu. Banyak channel-channel berita yang dibentuk oleh kelompok ideologi politik yang memframe semua berita berdasarkan kepentingan ideologinya. Alih-alih menjadi ruang publik untuk mendorong partisipasi politik yang positif, media sosial justru memberikan pengaruh negatif terhadap ruang publik, seperti penyebaran berita palsu dan menciptakan 'echo chambers' yaitu berkumpulnya pengguna yang berpikiran sama yang menjadi terisolasi dari opini alternatif. Keganasan munculnya berita palsu dan hoax sungguh di luar kendali dan akal sehat. Tidak hanya orang yang berpendidikan rendah tapi semua orang bisa terpengaruh hoax karena ketergantungan pada *smartphone* (Alimi, 2018).

Internet dan media sosial sebagai tempat teknologi informasi yang muncul dan berkembang kembali menjadi arena untuk mengulang perdebatan keagamaan. Terutama sejak populernya *smartphone* yang murah, internet menjadi tempat mengekspresikan kepentingan untuk mendakwahkan ideologi keagamaan yang dianggap lebih murni. Kelompok-kelompok salafi wahabi yang berasal dari kalangan terdidik perkotaan dan mempunyai kemampuan teknologi lebih baik mewarnai internet. Sehingga hampir mayoritas konten keagamaan di internet lebih berwarna salafi wahabi, yaitu kelompok agama yang menekankan pada individualitas dimana setiap orang bias langsung mengakses kitab suci tanpa guru dan pada pemahaman yang tekstual terhadap kitab suci, dan tidak menyukai adanya pengaruh kebudayaan dalam ekspresi keagamaan (Alimi, 2018).

Bukan saja memberikan kemudahan namun kehadiran Revolusi Industri 4.0 mengakibatkan munculnya disrupsi. Satu hal yang menjadi kekhawatiran fenomena disrupsi ialah terjadi pergeseran

mendalam bagaimana cara publik membentuk pemahaman dan praktik keagamaan serta dapat menghilangkan pengaruh otoritas organisasi keagamaan (Zaenuddin, 2020). Agama mengalami deprivatisasi merupakan salah satu contoh akibat adanya disrupsi dalam kehidupan beragama. Awalnya pengetahuan faktual keberagamaan merupakan sesuatu yang bersifat terbatas dan hanya dapat dipelajari oleh orang tertentu yang merupakan pakar-pakar dalam bidang keberagamaan. Namun saat era disrupsi, pengetahuan faktual keberagamaan telah berubah menjadi bersifat umum dan dapat di konsumsi oleh public (Casanova, 2009). Paham keagamaan umat beragama bergeser tidak hanya berdasarkan dari fatwa atau petuah keagamaan tokoh-tokoh agama yang kompeten. Namun pemahaman keagamaan umat beragama didasarkan pada teknologi komunikasi informasi yang instan, cepat dan praktis dalam menyampaikan berbagai informasi terkait keagamaan. Hal ini mengakibatkan tampilnya orang yang menjadi tokoh agama 'dadakan' di dunia digital. Orang yang tanpa background keagamaan mendalam mampu menarik perhatian dan mendapat banyak pengikut dan akhirnya disebut-sebut sebagai ulama, ustadz atau lain sebagainya. Padahal pengetahuan dan pengalaman keagamaan tokoh agama 'dadakan' tersebut bukan berasal dari lingkungan pendidikan keagamaan yang kompeten. Mereka hanya belajar ilmu keagamaan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang tersedia, tidak dengan belajar secara mendalam dan dalam waktu yang panjang di lembaga pendidikan keagamaan.

Pergeseran berikutnya yang perlu dipikirkan adalah matinya kepakaran, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari ahlinya dengan melalui proses belajar secara mendalam dan melelahkan, tergantikan oleh internet. Sebagai dampak dari beragam informasi di era industri 4.0 sangat mudah dan praktis, banyak orang di dunia digital menobatkan diri sebagai ahli, ada yang mengaku sebagai ahli kesehatan, ahli sejarah dan ahli di bidang lainnya bahkan ahli di bidang agama (Nichols, 2017). Sehingga sering kali informasi yang diperoleh pun tanpa ketahu dengan pasti kebenaran informasi tersebut. Pertimbangan apakah informasi yang diperoleh merupakan informasi yang benar atau tidak cenderung menjadi urusan terakhir. Pada akhirnya, hal ini menjadi salah satu dampak yang membuat banyak orang mendapatkan informasi yang tidak benar atau hoax (Zaenuddin, 2020).

Fenomena pada era disrupsi juga menyebabkan pergeseran makna otentisitas beragama. Maksudnya, penilaian kesalehan seseorang berdasarkan simbol-simbol keagamaan yang digunakan, seperti asesoris-asesoris keagamaan dan pakaian-pakaian keagamaan. Kelirunya, simbol-simbol keagamaan seakan meniadakan kesalehan yang otentik seperti intensitas ritual keagamaan dan segala perbuatan kebajikan yang terkandung dalam ajaran agama (Zaenuddin, 2020). Ketika kesalehan hanya memperhatikan simbol-simbol keagamaan, sering kali akan terjebak pada tataran simbolis yang menilai orang yang berbeda simbol sebagai orang yang keliru menjalankan kesalehan beragama. Begitupun sebaliknya, ketika kesalehan hanya memperhatikan otentisitas keberagamaan, cenderung akan bersifat menyepelkan simbol keagamaan dan bahkan menganggap simbol keagamaan tidak penting. Karena itu, penilaian terhadap kesalehan seseorang sebaiknya didasarkan pada pemahaman dan praktik keagamaan yang menjalankan otentisitas keberagamaan dan simbol keberagamaan secara beriringan tanpa membedakan keduanya.

Memahami berbagai pergeseran pemahaman dan praktik keagamaan pada era disrupsi di atas akan meningkatkan potensi konflik, sebab agama cenderung dipahami sebatas simbolis dan cenderung otentisitas beragama diabaikan. Dengan mudahnya mendapatkan informasi yang tidak akurat hanya melalui ujung jari, agama hanya dipahami pada tataran eksoteris tidak mendalam pada tataran esoterik. Karenanya, penting untuk menerapkan literasi keberagamaan secara maksimal, sehingga dapat menjadi pengetahuan mendalam dari informasi yang diperoleh, apakah informasi tersebut benar atau bohong, serta berupaya memperoleh pengetahuan keagamaan betul-betul dari ahli agama yang jelas kompetensi keilmuannya walaupun itu dibantu dengan kemajuan teknologi komunikasi informasi.

3.3. Peran Agama di Ruang Publik pada Era Disrupsi

Struktur institutional yang membentuk kehidupan sosial, politik, dan ekonomi secara dramatis bervariasi sepanjang dunia dalam selama berabad-abad. Beberapa sistem telah berjalan lebih baik daripada yang lain namun semuanya tetap ada masalah dan ketimpangan. Menentang pemerintahan dan struktur sosial yang dipandang tidak adil dan menindas adalah ciri yang sah. Umat beragama harus selalu mementingkan cara-cara yang paling tepat dan konstruktif untuk membangun institusi berdasarkan prinsip-prinsip fundamental dan situasi yang terus berubah (Kuswana, Qomaruzzaman, & Mahatma, 2020). Model kesaksian profetis Kita Suci tetap relevan dan berpengaruh. Persamaan yang kuat dalam penekanan Kitab Suci atas keadilan sosial dan ekonomi disamping rasa belas kasihan kepada anggota masyarakat yang lemah, dan orang miskin. Kesaksian profetis dalam tradisi agama ini menyerukan perhatian kepada ketidakadilan dan praktik-praktik menindas. Agama menawarkan satu pandangan alternatif dan menawarkan harapan bagi kehidupan ditengah-tengah kehidupan sosial-politik masyarakat.

Memahami diskursus teori sekularisasi yang menunjukkan bahwa sekularisasi tidak akan pernah terjadi secara total dan tidak terkubur menjadi teori yang gagal, sehingga sekularisasi mesti dilampaui (Rosyad, Mubarak, Rahman, & Huriani, 2021). Serta Beberapa contoh hubungan integral agama dan negara di atas telah memberikan pengalaman dunia untuk meninjau kembali bagaimana semestinya agama berperan dalam ruang public (Kuswana et al., 2020). Terlebih lagi pada ruang publik era disrupsi saat ini yang penuh dengan 'polusi' prasangka dan kebencian.

Pemisahan gereja dan negara dalam agama Kristen tidak berarti pemisahan teologi dari kehidupan publik. Menurut Stackhouse, teologi tidak terpisah dari upaya mengawal kehidupan politik dan ekonomi melalui persuasi, khotbah dan pengajaran. Bagi Stackhouse, dalam hal menyikapi keragaman di ruang publik, doktrin Trinitas sangat menginspirasi untuk mengintegrasikan keragaman. Tugas gereja kini ialah bagaimana mengkomunikasikan kekayaan doktriner gereja itu secara publik. Sehingga gereja sungguh menjadi berkat bagi bangsa. Seperti yang dikatakan oleh John Simon, "Semakin teologi suatu agama fungsional dan kontekstual, semakin agama tersebut menemukan perannya di ruang-ruang publik. Jika tidak, ia mati." (Putra Purba, 2018) Sekularisasi dapat menjadi refleksi bagi gereja masa kini yang terlalu sibuk dengan urusan dogmatika dan gerejanya, tanpa memedulikan dunia sekular yang menjadi ladang dan tanggung jawabnya (Zaluchu, 2018).

Agama yang tidak hanya berada di ranah privat namun bisa juga berperan di ranah publik. Ruang publik adalah area sosial yang ditawarkan oleh jalan, taman, media, Internet, pusat perbelanjaan, Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemerintah nasional, dan lingkungan lokal. Ruang publik menyelumuti ketegangan yang nyata antara tempat yang dialami di semua skala kehidupan sehari-hari, seperti halnya internet, opini populer, dan institusi serta ekonomi global yang tampaknya tidak memiliki ruang (Burchardt, 2015).

Ruang publik sebagai area kehidupan sosial dimana orang berkumpul untuk membahas masalah yang harus diselesaikan dalam proses politik. Untuk itu akses ke semua sumber informasi harus terbuka untuk umum dan informasinya harus dapat didiskusikan secara bebas. Dalam ruang publik akan terbentuk pendapat mayoritas atau opini publik tanpa sensor, tanpa dominasi dan tanpa berbagai hambatan. Setiap individu yang notabennya ialah warga privat dan bebas memasuki ruang publik untuk berpartisipasi dalam dikursus demokrasi sosial untuk kepentingan umum dan juga untuk mencapai tujuan-tujuan politik bersama (Rahman, 2010). Ruang publik dengan ini berkarakter inklusif, komunikatif dan majemuk. Suatu produk diskusi dalam ruang publik jelasnya dibingkai rasionalitas kritis dan akan bercorak universal, artinya menyapa semua warga dalam suatu negara. Interaksi sosial

dalam ruang publik tidak mengenal perbedaan karena status dan sebagainya. Ruang publik merupakan forum kesetaraan yang berlaku hanyalah otoritas argumen. Kesepakatan yang rasional antar warga dalam ruang publik merupakan sarana untuk mengantikan penyelesaian konflik dengan cara kekerasan. Model kesepakatan ini lahir dari komunikasi yang rasional berdasarkan landasan dan argumen yang kuat dan juga harus bisa dikritik dan dikoreksi.

Agama yang selalu dengan dua muka, integrasi-disintegrasi. Satu sisi agama menciptakan ikatan bersama. Sisi lain, agama juga seringkali disalahpahami sehingga agama dapat menyebabkan perpecahan dalam kehidupan sosial masyarakat (Wahyuni, 2017). Berdasarkan pandangan Jose Casanova, Yudi Latif berpendapat untuk mengatasi dampak buruk hadirnya agama di ruang publik, perlu dipertimbangkan hubungan agama dan negara selain hubungan pemisahan (saparasi) atau penyatuan (integrasi) yaitu kerangka pembedaan (diferensiasi). Diferensiasi menjadi suatu penyangkal dari asumsi pemudaraan agama di ruang publik, dikarenakan diferensiasi memiliki peranan penting untuk menumbuhkan semangat keagamaan dalam kehidupan publik masyarakat (Latif, 2013).

Berdasarkan pandangan Stepan, Yudi Latif mengemukakan dengan tersedianya kerangka hubungan agama dan negara yang diferensiasi memberi ruang untuk berkembangnya 'Toleransi Kembar' antara agama dan negara. Toleransi kembar yang dimaksud adalah situasi dimana institusi agama dan negara menyadari batas otoritas untuk kemudian mengembangkan toleransi terhadap fungsinya masing-masing. Agama dan negara masing-masing mampu mengembangkan peranan publiknya tanpa harus saling memaksa, karena telah menemukan konteks keterlibatannya yang tepat. Ketika agama dan negara dibedakan secara institutional maka peran agama pada kehidupan publik tetap berlangsung (Latif, 2016).

Menghadapi pergeseran cara beragama di era disrupsi saat ini semestinya agama dipahami dalam kerangka yang lebih inklusif, terbuka terhadap semua kemungkinan, tidak dipahami dalam kerangka yang sempit dan fanatik. Sebaiknya, kesalehan tidak hanya sekadar fokus pada simbol keagamaan yang akan membuat umat beragama terjebak pada tataran simbolis. Ketika berhenti hanya pada tataran simbolis cenderung menilai orang yang berbeda simbol sebagai orang yang keliru menjalankan kesalehan beragama (Rahman, 2011). Begitupun sebaliknya, kesalehan tidak boleh hanya fokus pada otentisitas keberagamaan yang sering kali menampilkan sifat menyepelkan dan menganggap tidak penting simbol keagamaan. Kesalehan beragama semestinya berdasarkan pemahaman dan praktik keagamaan yang menjalankan otentisitas keberagamaan dan simbol keberagamaan secara beriringan tanpa membedakan keduanya.

Ragam identitas agama dan paham keagamaan dalam suatu agama merupakan realita kehidupan yang semestinya dinikmati sebagai kekayaan kultural. Pada era disrupsi, kekayaan kultural ini tidak akan mampu dihadapi dengan sikap eksklusif, perlu dijalani secara inklusif. Keterbukaan umat beragama terhadap ragam identitas yang ada akan membawa saling memahami dan menghormati serta pada akhirnya dapat sama-sama menghadirkan agama untuk berperan dalam kehidupan publik yang lebih baik.

Ruang publik merupakan akses bersama bagi semua dari berbagai ragam identitas. Setiap orang tanpa dilihat agamanya apa memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk berperan membangun kehidupan bersama di ruang publik. Penting ialah dihindari dominasi satu agama atau satu paham keagamaan dalam suatu agama, sebab dengan dinamika dan dialektika ragam identitas agama yang ada dapat menjadi kekayaan kultural membangun kehidupan publik yang lebih baik. Kegagalan menetralkan dominasi satu agama atau paham keagamaan dalam suatu agama di ruang publik akan membawa dunia kembali pada masa lalu yang kelam, penuh dengan perperangan dan kekerasan.

4. Kesimpulan

Sekularisasi tidak akan pernah terjadi secara total dan tidak terkubur menjadi teori yang gagal. Tetapi karena dunia saat ini sudah berada pada realitas yang jauh berbeda dari era teori sekularisasi muncul, maka sekularisasi mesti dilampaui. Artikel ini menunjukkan bahwa pada era disrupsi saat ini terjadi perubahan mendasar terkait bagaimana cara publik membentuk paham keagamaan yang dapat menghilangkan pengaruh otoritas organisasi keagamaan. Karenanya, agama tidak harus disudutkan dari ruang publik, sejauh ruang publik dapat menjadi ruang bersama untuk mengekspresikan ragam agama yang ada dan agama tidak sekedar dipahami sebatas simbolis namun lebih mendalam pada pemahaman otentisitas beragama. Agama mesti hadir dan dapat berperan di ruang publik agar dapat dirasakan manfaatnya dalam kehidupan nyata. Namun, harus dihindari ialah dominasi satu agama atau satu paham keagamaan dalam suatu agama, sebab dengan dinamika dan dialektika ragam identitas agama yang ada dapat menjadi kekayaan kultural membangun kehidupan publik yang lebih baik. Kegagalan menetralkan dominasi satu agama atau paham keagamaan dalam suatu agama di ruang publik akan membawa dunia kembali pada masa lalu yang kelam, penuh dengan perperangan dan kekerasan.

Referensi

- Affandi, H. I. (2004). *Akar konflik sepanjang zaman: elaborasi pemikiran Ibn Khaldun*. Bandung: Pustaka Pelajar.
- Alimi, M. Y. (2018). *Mediatisasi agama, Post Truth Dan ketahanan Nasional: Sosiologi Agama Era Digital*. Moh Yasir Alimi.
- Berger, P. (1997). Epistemological modesty: an interview with Peter Berger. *Christian Century*, 114(30), 974.
- Burchardt, M. (2015). Should Public Space be Secular. *Religious Plurality and the Public Space Joint Christian-Muslim Theological Reflections*, 155–167.
- Casanova, J. (2009). Religion, Politics and Gender Equality: Public Religions Revisited (Draft). *A Debate on the Public Role of Religion and Its Social and Gender Implications, Draft Working Document of United Nations Research Institute for Social Development*. Geneva: INRISD.
- Fuchs, C. S., Doi, T., Jang, R. W., Muro, K., Satoh, T., Machado, M., ... Metges, J.-P. (2018). Safety and efficacy of pembrolizumab monotherapy in patients with previously treated advanced gastric and gastroesophageal junction cancer: phase 2 clinical KEYNOTE-059 trial. *JAMA Oncology*, 4(5), e180013–e180013.
- Habermas, J. (1991). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society*. MIT press.
- Hjarvard, S. (2016). Mediatization and the changing authority of religion. *Media, Culture & Society*, 38(1), 8–17.
- Kimball, C. (2008). *When Religion Becomes Evil; Five Warnings Signs, edisi digital*. New York: Harper Collins Publisher.
- Kuswana, D., Qomaruzzaman, B., & Mahatma, M. (2020). *Agama dan wabah: Tanggapan ulama Jawa Barat atas Covid-19 tahun 2020*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Latief, M. (2017). Islam dan Sekularisasi Politik di Indonesia. *Tsaqafah*, 13(1), 1–24.
- Latif, Y. (2013). *Tuhan pun tidak partisan: melampaui sekularisme dan fundamentalisme*. Syabas Books.
- Latif, Y. (2016). Ketuhanan Sebagai Moralitas Publik. *Maarif: Arus Pemikiran Islam Dan Sosial*, 11(1), 98–125.
- Mukhlisin, M. (2020). Urgensi Pendidikan Agama di Era Disrupsi. *Prosiding Seminar Nasional Keagamaan*, 1(1).
- Nichols, T. (2017). *The death of expertise: The campaign against established knowledge and why it matters*. Oxford University Press.
- Pachoe, R. D. A. (2016). Sekularisasi dan Sekularisme Agama. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 1(1), 91–102. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v1i1.1372>
- Putra Purba, H. (2018). *Gereja dan Ruang Publik: Tinjauan Teologis atas Kiprah HKBP dalam Ruang Publik Berdasarkan Pemikiran Max Lynn Stackhouse*. Universitas Kristen Duta Wacana.
- Rahman, M. T. (2010). Pluralisme Politik. *WAWASAN: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 34(1), 1–13.
- Rahman, M. T. (2011). *Glosari Teori Sosial*. Ibnu Sina Press.
- Rosyad, R., Mubarak, M. F., Rahman, M. T., & Huriani, Y. (2021). *Toleransi Beragama dan Harmonisasi Sosial*. Bandung: Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53.

- Schwab, K. (2016). *The fourth industrial revolution* (First US edition). New York: Crown Business.
- Stark, R. (1999). Secularization. *Sociology of Religion*, 60(3), 249–273. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/3711936>
- Stark, Rodney, & Iannaccone, L. R. (1994). A supply-side reinterpretation of the "secularization" of Europe. *Journal for the Scientific Study of Religion*, 230–252.
- Suhandi, S. (2012). Sekularisasi Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Konsep Kenegaraan. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 7(2), 71–90.
- Wahyuni, D. (2017). Agama Sebagai Media dan Media Sebagai Agama. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama*, 18(2).
- Yamin, M. (1959). *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Prapantja.
- Zaenuddin, A. (2020). Fenomena Beragama di Era Disrupsi, Post-Truth Society dan Komoditas Simbolik. *Kompasiana*.
- Zaluchu, S. E. (2018). Mengkritisi Teologi Sekularisasi. *Kurios*, 4(1), 26. <https://doi.org/https://doi.org/10.30995/kur.v4i1.31>



© 2021 by the author. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).